

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS TENAGA KERJA

JI. Gubernur H Aberani Sulaiman No. 129 Telp /Fax. (0517) 31673 Rantau 71111

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

	PENDAHULUAN
DADI	
BAB I	1 PENDAHULUAN 1 1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD 1 2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1 3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD
BAB II	2 IKTHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
	2 1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja SKPD
	2 2 Hambataan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD
BAB III	3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD 3 1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan 3 1 1 Pendapatan LRA 3 1 2 Belanja 3 1 3 Pendapatan – LO 3 1 4 Beban 3 1 5 Aset 3 1 6 Kewajiban 3 1 7 Ekuitas Dana
BAB IV	4 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinay dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB V	5 Penutup

Rantau, 22 April 2024

AL SAPUANIS SOS MAP

DINAS TENAGA KERJA

Pembina Utama Muda NIP 19680415 199002 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS TENAGA KERJA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

BAB I PENDAHULUAN

11 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyususun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari

- Laporan Realisasi Anggaran,
- 2 Neraca,
- 3 Laporan Operasional,
- 4 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5 Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan pemerintah dan penyusunannya harus memenuhi prinsip- prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing SKPD akan dikompilasi dan dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tapin

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan



yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya

Laporan keuangan SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 ini disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Peruabahan Ekuitas, Laporan Oprasional dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dapat menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin selama satu periode pelaporan

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah

- 1 Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
- 2 Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin
- 3 Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

12 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin atas pelaksanaan APBD TA 2023 adalah

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong,
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara,



- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara,
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan,
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keungan Daerah,
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah,
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK 05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan,
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah,
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin,
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin,
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,



20 Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin Berbasis Akrual

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut

- 1 PENDAHULUAN
 - 14 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 15 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 16 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD
- 2 IKTHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
 - 2 3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja SKPD
 - 2 4 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target
- 3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
 - 3 1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 3 1 1 Pendapatan LRA
 - 3 1 2 Belanja
 - 3 1 3 Pendapatan LO
 - 314 Beban
 - 315 Aset
 - 3 1 6 Kewajiban
 - 3 1 7 Ekuitas Dana
- 4 PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
- 5 PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing sasaran, program dan kegiatan telah diuraikan dalam Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2023

Realisasi belanja terhadap kegiatan yang dilaksanakan dari alokasi dana sebesar Rp.13 289 199 642,00 (Tiga belas milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) 83,89% dari anggaran sebesar Rp. 15 840.429 862,00 (Lima belas milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)

Capaian kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut

	Target	Realisası	Persent ase
(Rp)		(Rp)	(%)
Rp	18.620.781,00	Rp 18 514 800,00	99,43
Rp	6 864 700,00	Rp 6 860 200,00	99,93
Rp	11 756 081,00	Rp 11 654 600,00	99,14
Rp	3.249.232.851,00	Rp 3.091.165 378,00	95,14
Rp	3 242 987 351,00	Rp 3 085 032 178,00	99,13
Rp	6 245 500,00	Rp 6 133 200,00	98,20
	Rp Rp Rp	(Rp) Rp 18.620.781,00 Rp 6 864 700,00 Rp 11 756 081,00 Rp 3 249.232.851,00 Rp 3 242 987 351,00	(Rp) (Rp) Rp 18 620 781,00 Rp 18 514 800,00 Rp 6 864 700,00 Rp 6 860 200,00 Rp 11 756 081,00 Rp 11 654 600,00 Rp 3 249.232.851,00 Rp 3.091.165 378,00 Rp 3 242 987 351,00 Rp 3 085 032 178,00



Administrasi Umum Perangkat	Rp	1 326 130 091,00	Rp 1 247 377.003,00	94,06
Daerah	кр	1.520.150.071,00	тр 1 27/ 3// 1003,00	74,00
a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	253 361 286,00	Rp 186 548 907,00	73,63
b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	110 567 875,00	Rp 104 038 800,00	94,09
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	18 456 930,00	Rp 16 542 000,00	89,62
d Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	943 744 000,00	Rp 940 247 296,00	99,63
Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp	378.778 652,00	Rp 200.430 000,00	52,91
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		,		52,91
a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	378 778 652,00	Rp 200 430 000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang	Rp	164.422 208,00	Rp 155 559 831,00	94,61
Urusan Pemerintahan Daerah a Penyediaan Jasa Komunikasi,	Rp	82 222 208,00	Rp 76 959 831,00	93,60
Sumber Daya Air dan Listrik b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	82 200 000,00	Rp 78 600 000,00	95,62
Pemeliharaan Barang Milik	Rp	2.343 051.184,00	Rp 1 661 303.443,00	70,90
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	65 163 984,00	Rp 50 481 353,00	77,47
b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	8 660 000,00	Rp 6.010.000,00	69,40
c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	2 269 227 200,00	Rp 1 604 812 090,00	70,72
Pelaksanaan Pelatihan	Rp	899 125 276,00	Rp 745.078.600,00	82,87
a Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		899 125 276,00	Rp 745 078 600,00	82,87



Pembinaan Lembaga Pelatihan	Rp	15.341 650,00	Rp	13.696 000,00	89,27
Kerja Swasta	D	15 241 650 00	D	12 (0(000 00	00.27
A Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp	15 341 650,00	Rp	13 696 000,00	89,27
Pelayanan Antar Kerja di	Rp	6 083 081.863,00	Rp 5	065 268 027,00	83,27
Daerah Kabuapaten/Kota					
a Pelayanan Antar Kerja	Rp	11 605 700,00	Rp	10 171 000,00	87,64
b Penyuluhan dan Bimbingan	Rp	17 555 700,00	Rp	14 103 000,00	80,33
Jabatan bagi Pencari Kerja			line u		
c Perluasan Kesempatan Kerja	Rp	6 053 920 463,00	Rp 5	040 994 027,00	83,27
Pengelolaan Informası Pasar	Rp	99.245.030,00	Rp	89 492 500,00	90,17
Kerja		10.00 ADVIDENTED D 12.020			00.45
a Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp	99 245 030,00	Rp	89 492 500,00	90,17
informasi Pasar Kerja Olimic					
Perlindungan PMI (Pra dan	Rp	486 374.180,00	Rp	252.444.090,00	51,90
Purna Penempatan) di Daerah					
Kabupaten/Kota	D	466 274 406 00	D	225 459 000 00	50,49
a Peningkatan Perlindungan dan	Rp	466 374 496,00	Rp	235 458 090,00	30,49
Kompetensi Calon Pekerja					
Migran Indonesia (PMI)/Pekerja					
Migran Indonesia (PMI) b Penyediaan Layanan Terpadu	Rp	19 999 684,00	Rp	16 986 000,00	84,93
pada Calon Pekerja Migran	Kp	19 999 004,00	Kp	10 700 000,00	0.,50
pada Caion i ekcija wiigian					
Pengesahan Peraturan	Rp	611 641 396,00	Rp	603.489 370,00	98,67
Perusahaan dan Pendaftaran					
Perjanjian Kerja Bersama Untuk					
Perusahaan yang hanya					
Beroperasi dalam 1 (Satu)					
Daerah Kabupaten/Kota	n	5 700 000 00	Des	5 083 150,00	89,07
a Pengesahan Peraturan	Rp	5 706 968,00	Rp	3 083 130,00	89,07
Perusahaan bagi Perusahaan	Dn	605 934 428,00	Rp	598 406 220,00	98,76
b Penyelenggaraan Pendataan dan	Rp	003 934 428,00	Кр	376.400.220,00	,,,,,
Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial					
Tenaga Kerja serta Pengupahan					
renaga Kerja serta rengupanan					
Pencegahan dan Penyelesasian	Rp	165 384.700.00	Rp	145 680.600,00	88,09
Perselisihan Hubungan					
Industrial, Mogok Kerja, dan					
Penutupan Perusahaan di					
Daerah Kabupaten/Kota	D-	83 713 500,00	Rp	72 990 600,00	87,19
	Rp	65 /13 300,00	Kp	12 330 000,00	07,17



JI	JMLAH	Rp	15 840 429 862,00	Rp1	3.289 199 642,00	83,89
Kerja, dan I Perusahaan Berakibat/B Kepentinga Kabupaten/ b Penyelesaia Hubungan I Kerja, dan I Perusahaan Berakibat/B Kepentinga Kabupaten/	yang erdampak pada n di 1 (Satu) Daerah Kota n Perselisihan ndustrial, Mogok Penutupan yang erdampak pada n di 1 (Satu) Daerah Kota	Rp	81 671 200,00	Rp	72 690 000,00	88,63

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, antara lain

- 1 Kondisi keuangan daerah dalam keadaan defisit sehingga ada belanja yang terutang yang menyebabkan tidak tercapainya target
- 2 Dalam penanganan penempatan dan perluasan kesempatan kerja masih belum adanya sinergitas lintas sektoral
- 3 Masıh rendahnya tıngkat produktıvıtas masyarakat/pencarı kerja yang ada
- 4 Belum adanya forum koordinasi yang integratif/forum jejaring antar lembaga swasta dalam melaksanakan kebijakan peningkatan skill Sumber Daya Manusia (SDM)
- 5 Masih adanya permasalahan hubungan industrial yang kurang harmonis antara pekerja dan pengusaha dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan

Sebagaimana diketahui bahwa pemecahan terhadap masalah ketenagakerjaan sangat membutuhkan upaya yang terpadu, terkoordinasi dan terencana dari banyak pihak yang terkait. Selain itu prasyaratan utama lainnya yang harus dimiliki adalah adanya komitmen untuk mengarusutamakan ketenagakerjaan dalam setiap aspek pembangunan yang benar-benar kuat dari



semua pihak mulai dari tingkat kebijakan hingga tingkat pelaksana untuk menjamin bahwa kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan yang telah dirumuskan dapat terwujud menjadi rangkaian kegiatan yang efektif Perlu disadari bahwa sesungguhnya otoritas penciptaan kesempatan kerja yang ada pada Dinas yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan adalah penyaluran mekanisme pasar kerja, pelatihan, pembinaan hubungan industrial, serta peningkatan produktivitas, sedangkan penciptaan kesempatan kerja yang terkait dengan perekonomian dan kebijakan lainnya secara praktis berada pada fungsi instansi lain, bukan pada instansi ketenagakerjaan Selain itu, mengingat cakupan bidang ketenagakerjaan tersebut sangat luas dan rumit, maka peran aktif seluruh pihak menjadi salah satu kunci utama kesuksesan pembangunan ketenagakerjaan



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dari Penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

3.11 Pendapatan LRA

Jumlah realisasi pendapatan LRA pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah Rp 0,00

312 Belanja

Struktur Belanja sesuai Standar Akuntasi Pemerintah (SAP), terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu

- a Belanja Operasi,
- b Belanja Modal,
- c Belanja Tak Terduga, dan
- d Belanja Transfer

Realisasi belanja secara keseluruhan periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 13 289.199 642,00 atau 83,89%** dari anggaran belanja tahun 2023 sebesar **Rp. 15 840 429 862,00** yang terdiri dari

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	15 361 228 926,00	13 031 919 282,00	84,84
2	Belanja Modal	479 200 936,00	257 280 360,00	53,69
	Jumlah Belanja	15.840.429.862,00	13.289.199.642,00	83,89



3.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi secara keseluruhan periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 13 031 919 282,00** atau **84,84%** dari anggaran belanja operasi tahun 2022 **Rp 15 361.228 926,00** yang terdiri dari

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1_	Belanja Pegawai	3 267 977 351,00	3 099 312 178,00	94,84
2	Belanja Barang dan Jasa	12 093 251 575,00	9 932 607 104,00	82,13
	Jumlah	15.361 228.926,00	13 031 919.282,00	84,84

Realisasi Belanja Pegawai sebesar **Rp. 3.099 312 178,00 (94,84%)** merupakan realisasi pembayaran

JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1. Belanja Pegawai .			
Gajı Pokok PNS	1 287 553 175,00	1 227 615 030,00	95,34
Tunjangan Keluarga	109 825 397,00	99 707 856 00	90,79
Tunjangan Jabatan	135 470 000,00	131 810 000,00	97,30
Tunjangan Fungsional	138 100 000,00	133 560 000,00	96,71
Tunjangan Fungsional Umum	13 540 000,00	12 930 000,00	95,49
Tunjangan Beras	70 421 208,00	64 815 900,00	92,04
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8 150 304,00	8 150 304,00	100
Pembulatan Gaji	367 267,00	163 309,00	44,47
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	571 686 020,00	539 091 957,00	94,30
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	87 982 014,00	83 485 541,00	94,89
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	819 891 966,00	783 702 281,00	95,59
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	24 990 000,00	14 280 000,00	57,14
JUMLAH	3 267 977.351,00	3 099.312.178,00	94,84



Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 9 932 607 104,00 (82,13%)** merupakan realisasi pembayaran

JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persen (%)
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	16 160 970,00	13 671 700,00	84,60
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41 385 276,00	26 220 300,00	63,36
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	16 796 520,00	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	228 898 031,00	185 378 800,00	80,99
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20 596 608,00	17 476 209,00	84,85
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	40 940 130,00	30 129 000,00	73,59
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	58 699 371,00	48 380 400,00	82,42
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23 815 284,00	21 229 300,00	89,14
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	203 000 185,00	154 469 300,00	76,09
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	13 991 340,00	9 660 000,00	69,04
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	47 549 407,00	38 769 036,00	81,53
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	4 122 432,00	3 711 300,00	90,03
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	40 070 950,00	36 432 811,00	90,92
Belanja Obat-Obatan Lainnya	1 026 000,00	1 000 000,00	97,47
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5 332 603 501,00	4 530 962 577,00	84,97
Belanja Natura dan Pakan Natura	26 374 079,00	6 329 000,00	24,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	257 469 800,00	149 500 000,00	58,07



Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8 780 750,00	5 932 500,00	67,56
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	415 539 700,00	375 254 000,00	90,31
Belanja Pakaian Adat Daerah	7 014 300,00	6 300 000,00	89,82
Belanja Pakaian Batik Tradisional	8 517 360,00	7 590 000,00	89,11
Belanja Pakaian Olahraga	12 360 000,00	11 120 000,00	89,97
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	225 300 000,00	177 900 000,00	78,96
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	69 710 000,00	63 560 000,00	91,18
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	156 500 000,00	98 000 000,00	62,62
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	20 000 000,00	2 456 000,00	12,28
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Belanja Tenaga Administrasi	147 404 000,00	142 304 000,00	96,54
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	131 400 000,00	123 000 000,00	93,61
Belanja Jasa Tenaga Ahli	64 500 000,00	13 500 000,00	20,93
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17 400 000,00	17 400 000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14 400 000,00	14 400 000,00	100,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100 000 000,00	90 090 090,00	90,09
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Fılm, dan Pemotretan	45 000 000,00	40 000 000,00	88,89
Belanja Tagihan Air	4 930 000,00	4 930 000,00	100,00
Belanja Tagihan Listrik	53 223 808,00	52 169 392,00	98,02
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24 068 400,00	19 860 439,00	82,52
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4 900 000,00	3 971 400,00	81,05
	343 889 440,00	343 652 320,00	99,93



JUMLAH	12 093 251 575,00	9 932 607.104,00	82,13
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50 250 000,00	47 775 000,00	95,07
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	876 694 000,00	876 592 296,00	99,99
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 823 360 000,00	1 434 990 523,00	78,70
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.660 000,00	6 010 000,00	69,40
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6 000 000,00	3 688 444,00	61,47
Belanja Bimbingan Teknis	240 000 000,00	240 000 000,00	100,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	161 700 000,00	8 819 820,00	5,45
Belanja Jasa Konsultansı Pengawasan Arsitektur	20 000 000,00	19 800 000,00	99,00
Belanja Jasa Konsultası Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondası serta Struktur Bangunan	72 000 000,00	71 273 000,00	98,99
Belanja Jasa Konsultası Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	285 749 000,00	62 358 747,00	21,82
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	5 200 000,00	3 200 000,00	61,54
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	41 250 000,00	17 650 000,00	42,79
Belanja Sewa Lapangan Lainnya	15 733 333,00	15 700 000,00	99,79
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	234 317 600,00	234 037 400,00	99,88
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			•



3 1 2 2 Belanja Modal

Realisasi belanja modal secara keseluruhan periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 257 280.360,00** atau **53,68%** dari anggaran belanja modal tahun 2022 sebesar **Rp. 479.200.936,00** yang terdiri dari

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	479 200 936,00	257 280 360,00	53,69
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	479 200.936,00	257.280 360,00	53,69

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp 257 280 360,00** merupakan realisasi pembayaran

JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Belanja Modal			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	26 445 000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	19 425 114,00	10 513 512,00	54,12
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	30 780 000,00	10 265 766,00	33,35
Belanja Modal Mebel	54 283 920,00	36.581 082,00	67,39
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3 500 000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Meja Pejabat	9 675 000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kursı Pejabat	4 688 250,00	0,00	0,00



JUMLAH	479 200 936,00	257 280 360,00	53,69
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	66 107 652,00	0,00	0,00
Belanja Modal Personal Computer	64 296 000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	200 000 000,00	199 920 000,00	99,96

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar **Rp 0,00** merupakan realisasi pembayaran

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisası (Rp)	%
1 Belanja Modal			
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0
JUMLAH	0,00	0,00	0

3.13. Pendapatan LO

Jumlah realisasi Pendapatan LO pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah Rp 0,00

3.1.4. Beban

Beban atas kegiatan operasional Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2023 yaitu

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik (turun) %
KEGIATAN OPERASIONAL	14 528 438 313,00	7 162 480 416,00	102,84
BEBAN OPERASI	14 509.776 152,00	7.104.989.716,00	104,22



Beban Pegawai	3.099 312 178,00	3 116 105 358,00	-0,54
Beban Barang dan Jasa	11 129 105 085,00	3 850 442 458,00	191,37
Beban Penyusutan dan Amortisasi	191 358 889,00	138 441 900,00	38,22
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	18.662.161,00	57.490.700,00	-67,54
Defisit	18 662 161,00	57 490 700,00	-67,54
Penjualan/Pertukaran/Pelepas an Aset Non Lancar-LO			

3 1.4 1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 adalah Rp 3 099 312 178,00 Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal Rincian beban pegawai untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp.)
Beban Gaji Pokok PNS	1 227 615 030,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	99 707 856,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	131 810 000,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	133 560 000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	12 930 000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	64 815 900,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8 150 304,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	163 309,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	539 091 957,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	83 485 541,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	783 702 281,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14 280 000,00
Total	3.099.312.178,00



3 1 4 2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2023 adalah sebesar Rp 11 219 105 085,00 Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap Rincian beban barang dan jasa untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13 671 700,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26 220 300,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	185 378 800,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	17 476 209,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	30 129 000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	47 406 900,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22 353 300,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	154 469 300,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9 660 000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	38 769 036,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.711 300,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	36 432 811,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1 000 000,00



Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada	5 160 267 687,00
Masyarakat	
Beban Natura dan Pakan-Natura	6 329 000,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	149 500 000,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5 932 500,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas	375 254 000,00
Lapangan	
Beban Pakaian Adat Daerah	6 300 000,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	7 590 000,00
Beban Pakaian Olahraga	11 120 000,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas,	177 900 000,00
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan	63 560 000,00
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	98 000 000,00
Pendidikan dan Pelatihan	
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2 456 000,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan	2 000 000,00
Sarana Umum	
Beban Jasa Tenaga Administrasi	142 304 000,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	123 000 000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	13 500 000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	17 400 000,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	14 400 000,00
Beban Jasa Konversı Aplıkası/Sıstem Informası	90 090 090,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	2 000 000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	40 000 000,00
Beban Tagihan Telepon	11 100,00
Beban Tagihan Air	5 179 000,00
Beban Tagihan Listrik	52 169 392,00



Beban Kawat/Faksımılı/Internet/TV Berlangganan	19 860 439,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	3 971 400,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	343 652 320,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	234 037 400,00
Beban Sewa Lapangan Lainnya	15 700 000,00
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	17 650 000,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	3 200 000,00
Beban Jasa Konsultansı Perencanaan Arsitektur- Jasa Arsitektur Lainnya	265 084 504,00
Beban Jasa Konsultansı Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	71 273 000,00
Beban Jasa Konsultansı Pengawasan Arsıtektur	19 800 000,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-	139 703 334,00
Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	
Beban Bimbingan Teknis	240 000 000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3 688 444,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6 010 000,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 758 165 523,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	876 592 296,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	47 775 000,00
Total	11.219 105 085,00



3.1.4.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 191 358 889,00 Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disesuaikan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud Rincian beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut

URAIAN	TAHUN 2023 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	147 083 989,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	44 274 900,00
Total	191 358 889,00



315 Aset

3 1 5.1 Aset Lancar

1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0,00

2. Piutang Lainnya

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0,00

3 Persediaan

	TA. 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Persediaan	937 500,00	1 124 000,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 937 500,00

3.152 Aset Tetap

Saldo aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2 917 567 273,00 yang terdiri dari

	_	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Tanah	1 799 450 000,00	1 799 450 000,00
2	Peralatan dan Mesin	1 313 361 772,00	857 284 150,00
3	Gedung dan Bangunan	2 231 931 000,00	2 231 931 000,00
4	Akumulası Penyusutan	(2 427 175 499,00)	(2 212 355 610,00)



1 Tanah

	TA. 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Tanah	1 799 450 000,00	1 799 450 000,00

Saldo tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 1 799 450 000,00 dengan rincian mutasi selama periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut

Saldo akhir per 31 Desember 2023	Rp	1 799 450 000,00	
Jumlah	Rp	1.799 450 000,00	

2 Peralatan dan Mesin

	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
Peralatan dan Mesin	1 313 361 772,00	857 284 150,00

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1 313 361 772,00 dengan rincian mutasi selama periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut

Jumlah	Rp.	1 258.722 611,00	
Pengurangan (berupa barang ekstrakom, reklasifikasi peralatan mesin ke aset rusak berat (asset lainnya)	Rp	54 639 161,00	
Penambahan (berupa belanja modal- pengadaan peralatan gedung kantor	Rp	456 077 622,00	
Saldo akhır per 31 Desember 2022	Rp	857 284 150,00	



3. Gedung dan Bangunan

	TA. 2023 (Rp)	TA. 2022 (Rp)
Gedung dan Bangunan	2 231 931 000,00	2 231 931 000,00

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2 231 931 000,00 dengan rincian mutasi selama periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut

Jumlah	Rp	2 231 931 000, 00
Penambahan (berupa belanja modal- pengadaan bangunan gedung kantor)	Rp	0,00
Saldo akhir per 31 Desember 2023	Rp	2 231 931 000, 00

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 2 231 931 000,00

4. Akumulası Penyusutan Aset Tetap

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp 2 427 175 499,00 dan Rp 2 212 355 610,00 Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut



No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulası Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	1 313 361 772,00	579 525 474,00	733 836 298,00
2	Gedung dan Bangunan	2 231 931 000,00	1 847 650 025,00	384 280 975,00
	ilah Akumulasi yusutan	3 545 292 772,00	2 427 175.499,00	1.118 117.273,00

3.15.3. Aset lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Adapun saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00, karena nilai perolehan Aset lain-lain sebesar Rp. 66 215 000,00 yang kemudian disusutkan dengan nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp. 66 215 000,00 sehingga Nilai buku nya menjadi Rp. 0,00

3.1.6 Kewajiban

3 1 6 1 Kewajiban Jangka Pendek

1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Sado utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

2 Utang Belanja

Saldo utang beban untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1 286 771 281,00 dan Rp 423 800,00 Saldo utang belanja per 31 Desember 2023 merupakan utang belanja yang disebabkan adanya belanja terutang atas pembayaran belanja air, belanja



telepon, pengadaan kandang ayam pedaging, jasa konsultansi pengawasan, rehab bangunan, jasa konsultansi perencanaan, pengadaan kandang kambing, pengadaan genset, pompa air pencacah rumput kandang kambing, dan pengadaan kambing yang akan dibayarkan di Tahun Anggaran 2024

3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 193 998 423,00 dan Rp 0,00 Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 merupakan utang jangka pendek lainnya disebabkan adanya belanja terutang atas belanja modal tahun 2023 yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024

3 1.7. Ekuitas

Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1 473 748 069,00 Nilai ekuitas diperoleh dari ekuitas awal Rp 2 677 009 740,00 dikurang defisit LO sebesar 14 528 438 313,00, ditambah koreksi ekuitas Rp 35 977 000,00, dan ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp 13 289 199 642,00



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

41 Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2018 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Beralamat Jalan Gubernur H Aberani Sulaiman No 129 Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin

4.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat terutama bidang ketenagakerjaan yang meliputi penempatan, pelatihan dan produktivitas serta hubungan industrial syarat kerja dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2018

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin adalah

1 Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin ialah Melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja



Fungsi 2

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Mempunyai Fungsi

- 1 Perumusan Kebijakan teknis lingkup penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan,syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja,
- 2 Pelaksanaan kebijakan teknis lingkup penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja,
- 3 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan perluasan kerja, pembinaan hubungan ındustrıal, jamınan sosial ketenagakerjaan, kelembagaan, syarat-syarat kerja dan pelatihan keterampilan, produktivitas kerja,
- 4 Pembinaan, pengawasan pengendalian UPT,
- 5 Pengelolaan kesekretariatan, dan
- 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

3 Sumber Daya Manusia

Jumlah

Berikut ini merupakan rekapitulasi pegawai yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin beserta jabatannya

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapın adalah 27 orang terdiri dari

Pejabat Struktural orang 4 orang Staf / Pelaksana 15 Jabatan Fungsional orang 27 orang



BAB V PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun ini sebagai pertanggung jawaban merupakan salah kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut

- Total belanja yang terealisasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sebesar Rp 13 289 199 642,00 atau 83,89% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp 15 840 429 862,00
- Nilai aset yang dikuasai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2 954 517 773,00
- Nilai kewajiban yang masih ditanggung Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1 480 769 704,00
- 4 Nilai Ekuitas yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1 473 748 069,00

Kınerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2023 masih ada yang belum tercapai karena ada belanja yang tidak bisa dibayarkan tahun 2023 dan akan dibayarkan pada tahun 2024 Belanja yang tidak bisa dibayarkan atau terutang tersebut sebesar Rp. 1 480 769 704,00 atau 9,35% dari anggaran belanja yang direncanakan

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Tapin

Rantau 22 April 2024

Pembina Utama Muda

NIP 19680415 199002 1 003

ANI S Sos M.AP

33